



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



**DINASPERUMAHANDAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Tahun 2019 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara utuh selama perjalanan Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh jajaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang telah mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Government*.

Balikpapan, 28 Februari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KOTA BALIKPAPAN



I KETUT ASTANA

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan: memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman
2. Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
3. Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman

Dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh
2. Mengurangi Backlog Perumahan
3. Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni
4. Meningkatnya Penyediaan Taman Kota
5. Meningkatnya Pelayanan Pemakaman

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang

keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan Tahun 2019 dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukkan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%), Adapun hasil capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	2,32	2,32	100
2.	Mengurangi Backlog Perumahan	79	42,88	146
3.	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,85	0,36	158,83
4.	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	0,017	0,015	88,23
5.	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	95	100	105

Terhadap capaian kinerja tersebut, khususnya capaian kinerja yang belum 100%, perlu mendapat perhatian dengan menentukan kendala atau permasalahan serta menganalisa faktor-faktor pendukung, peluang, serta strategi yang akan dilakukan terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi tersebut. Sehingga pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana dengan maksimal.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	3
E. Sistematika Penyajian.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	18
2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	33
3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman	34
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	35
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
B. Realisasi Anggaran.....	48
C. Capaian Prestasi dan penghargaan.....	56
Bab IV Penutup	57

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	iii
Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021	8
Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman	9
Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman	10
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	13
Tabel 6. Uraian dan Formulasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman.....	15
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman	17
Tabel 8. Jumlah RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan.....	26
Tabel 9. Data Pembuatan Taman Tahun 2019	28
Tabel 10. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan	29
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	33
Tabel 12. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan.....	34
Tabel 13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja	38
Tabel 14. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019	48
Tabel 15. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	50

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diberikan. Sebagai sebuah organisasi, perangkat daerah semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan serta masyarakat. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Tugas dan Fungsi

Dasar pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
2. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
3. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
4. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
5. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
6. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
7. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
8. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
9. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
10. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
12. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
13. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
14. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
15. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
16. pembinaan dan pengendalian UPT;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat membawahkan :**
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum;
3. **Bidang Perumahan membawahkan :**
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
4. **Bidang Permukiman membawahkan :**
 - a. Seksi Permukiman;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman
5. **Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :**
 - c. Seksi Pertamanan;
 - d. Seksi Permakaman; dan
 - e. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
6. **Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa**
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

D. Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJMD Kota

Balikpapan, Renstra Disperkim dan RTRW Kota Balikpapan), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (*Focus Group Discussion*) dengan OPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.

Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, tetapi identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas. Berpijak pada uraian di atas, dengan mendasarkan pada evaluasi internal organisasi, studi kepustakaan dan olah data, hasil kajian dan diskusi dalam forum-forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta hasil pengamatan selama menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait bidang urusan yang ditangani dan memetakannya sebagai berikut :

2. Tingginya *backlog* perumahan

Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun, sehingga diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi *backlog* perumahan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada, ditambah lagi dengan semakin tingginya arus perpindahan penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan menyebabkan masalah *backlog* perumahan menjadi isu utama yang harus ditangani dengan maksimal.

3. Masih perlunya penanganan lebih lanjut kawasan permukiman kumuh.

Meskipun pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan dinyatakan bebas kumuh berdasarkan data basis baseline KOTAKU, namun masih banyak peer penanganan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara maksimal. Dari tujuh indikator kumuh masih ada beberapa indikator yang belum tersentuh seperti masalah ketidakteraturan bangunan, proteksi kebakaran, sanitasi dan rumah tidak layak huni. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda

pembangunan daerah.

4. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.

Berkaca dari penanganan kawasan kumuh di kota Balikpapan yang ditangani, salah satunya bisa disebabkan karena masih adanya rumah tidak layak huni, yang secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu suatu permukiman menjadi kumuh. Masih adanya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Balikpapan diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2019, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman; serta struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2016-2021, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2019, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman serta strategi pemecahan masalah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2016-2021, yaitu “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, terutama pada misi ke dua yaitu : **“Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan”**, menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangun Kota Balikpapan, karena indikator misi kedua tersebut merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan harus disukseskan untuk dicapai.

Dalam kaitan hal tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

VISI

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah **“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”**

MISI

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Perumahan dan Permukiman disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	%	2,45	2,41	2,37	2,32	2,28	2,23
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	%	89	83	81	79	77	75
	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,011	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	%	90	92	94	95	96	98

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 memerlukan penjabaran dari sasaran strategis diatas harus dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Strategi :

- a. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- b. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman
- c. Mendorong Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Fasilitasi Pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
- e. Meningkatkan Jumlah Fasilitas dan Pelayanan Sanitasi
- f. Pembangunan Taman kota baru
- g. Perbaikan Layanan Permakaman

Kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan dengan strategi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Permukiman untuk mencegah kawasan kumuh baru.
- b. Pengentasan wilayah rawan sanitasi dan perluasan pelayanan sanitasi.
- c. Penerapan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	2,32 %
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	79 %
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	0,85%
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	0,017 %
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Areal Permakaman yang Terkelola dan Terpelihara	95 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka direalisasikan melalui program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2019 telah melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui 10 program dan 33 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dihuni	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Lingkungan Sehat Perumahan	Perencanaan
					Penanganan Permukiman Kumuh
					Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh					
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2019)					
2.	Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan
					Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
					Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan
				Pengelolaan Rumah Susun	Operasional Infrastruktur Rumah Susun
Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun					

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	
		Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Penanggungjawab Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	
3.	Meningkatkan keindahan	Meningkatnya Penyediaan	Persentase Penyediaan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	
	dan layanan pemakaman	Taman Kota	Taman Kota		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	
		Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	Pengelolaan Areal Pemakaman		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
						Penyediaan Alat Tulis Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			Penyediaan Makanan dan Minuman			

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
					Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai
				Penyebarluasan Informasi Daerah	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Perjanjian kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	2,32
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Persen	79
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Persen	0,85
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Persen	0,017
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	Persen	95

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan.

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

- kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman adalah uraian sebagai berikut :

Tabel 6. Uraian dan Formulasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi IKU
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	<u>Luas Kawasan Kumuh</u> Rencana Luas Kawasan Permukiman Pada RTRW
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	<u>Jumlah Backlog</u> Jumlah Rumah
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	<u>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</u> Jumlah Rumah
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	<u>Luas Taman</u> Luas Kawasan Perkotaan
5	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan Pemakaman	<u>Ahli Waris yang merasa puas</u> Ahli waris yang mengajukan pelayanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (LIMA) indikator merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Namun dalam perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil Capaian

kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil Capaian

kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis. Adapun kelima sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	2,32
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	%	79
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,85
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,017
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	95

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.451.246.250	APBD MURNI, DAK PENUGASAN
Program Pengembangan Perumahan	300.000.000	APBD MURNI
Program Pengelolaan Rumah Susun	4.500.000.000	APBD MURNI
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	286.330.000	APBD MURNI, DAK
Program Pengelolaan Areal Permakaman	4.387.180.000	APBD MURNI
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17.685.015.0000	APBD MURNI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.127.989.000	APBD MURNI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.144.800.000	APBD MURNI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	APBD MURNI
Program Penyebarluasan Informasi Daerah	52.500.000	APBD MURNI

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh				
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,32	2,32	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran yaitu persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Persentase berkurangnya} &= \frac{\Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh}}{\Sigma \text{ Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{267}{11.500} \times 100\% \\ &= 2,32\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{2,32}{2,32} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Realisasi sebesar 2,32% memenuhi target kinerja pada tahun 2019 sebesar 2,32%. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran Rp.300.000.000,00 meliputi penyusunan dokumen Ijin Lingkungan Penataan Lingkungan Kumuh, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (RK-PTPK) dan Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kumuh.
2. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran Rp.2.861.505.000,00 meliputi pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase Lingkungan Kumuh di Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Margo Mulyo, Kelurahan Baru Tengah, dan Kelurahan Muara Rapak.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran Rp.1.900.000.000,00 meliputi Peningkatan Sarana dan Sanitasi Sambungan Perpipaian ke IPAL Komunal Margasari (Hibah sAIIH Lanjutan) sebanyak 300 SR, Sambungan Rumah Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh sebanyak 5 SR, dan Peningkatan dan Pemeliharaan Sanimas sebanyak 250 SR.

Selain karena kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2019, keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh juga merupakan kolaborasi dari Pemerintah Kota Balikpapan dengan KOTAKU yang anggarannya berasal dari berbagai sumber (APBN dan APBD Prov). Kebijakan Penanganan kawasan kumuh seluas 5 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, selanjutnya diatas 10 dan 15 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dana APBN yang dikucurkan melalui program KOTAKU disinyalir telah mampu mengurangi kawasan kumuh di Kota Balikpapan secara signifikan. Adapaun 7 kriteria kawasan kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
- b. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis

- d. Tidak terpeliharanya Drainase
- e. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
- f. Kualitas Konstruksi Drainase
- g. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

Dengan dukungan dana dari berbagai sumber tersebut penanganan kawasan kumuh di Kota Balikpapan pada tahun 2019 telah melampaui dari 5 ha yang berarti telah melebihi dari target kinerja dengan sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh. Bahkan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan adalah seluas 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019.

Permasalahan yang dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Meskipun telah berhasil mengentaskan kawasan permukiman kumuh berdasarkan data basis *baseline* numerik dengan 0 ha, namun secara visual kawasan permukiman kumuh masih perlu penanganan serius, hal ini dikarenakan dari 7 kriteria penentu kumuh tidak semua berhasil ditangani dengan maksimal, sehingga masih perlu penanganan lebih lanjut. Kota Balikpapan dikatakan zero kumuh karena berdasarkan perhitungan tersebut angkanya berhasil di bawah nilai 19, sementara jika masih diatas angka 19 termasuk dalam kategori kekumuhan rendah. Tetapi walau mendapatkan poin di bawah 19 pada dasarnya dari 7 kriteria tersebut masih menjadi tugas Pemerintah Kota untuk terus melakukan pembenahan agar baik secara perhitungan maupun secara visual wilayah permukiman kumuh berhasil dituntaskan.
2. Masih sering terjadi penolakan penolakan karena pola pikir masyarakat tentang IPAL/Pengolahan limbah dapat mengeluarkan bau sehingga beberapa lokasi pada awalnya menolak kegiatan ini, namun telah dilakukan upaya sosialisasi masyarakat tentang pentingnya memiliki

septic tank yang sehat disetiap rumah tangga agar limbah rumah terkelola dan tidak mencemari lingkungan.

3. Menentukan dan mendapatkan lahan yang akan dihibahkan untuk pembuatan IPAL (5 x 10 m) cukup sulit sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
4. Pola hidup yang kurang sehat masyarakat di lingkungan kumuh, yang secara otomatis akan mempengaruhi penanganan kawasan kumuh dimaksud, sehingga perlu ketelibatan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam rangka memberikan sosialisasi kepada Masyarakat.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 2 : Mengurangi Backlog Perumahan				
1	Persentase penurunan backlog perumahan	79%	42,88%	115,12

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Backlog Perumahan sebesar 115,12% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Backlog} &= \frac{\Sigma \text{Backlog}}{\Sigma \text{Rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{86.848}{202.539} \times 100\% \\
 &= 42,88\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{79 - (42,88-79)}{79} \times 100\% \\
 &= 146\%
 \end{aligned}$$

Jika dianalisa lebih lanjut pada dasarnya backlog perumahan terbagi

menjadi dua jenis yaitu :

1. *Backlog* Hunian
2. *Backlog* Kepemilikan

Kota Balikpapan jika dibagi berdasarkan jenis backlog tersebut pada dasarnya yang memiliki poin tertinggi adalah dari backlog kepemilikan, artinya jika dianalisa lebih dalam pada dasarnya penduduk di Kota Balikpapan sudah sebagian besar telah menempati rumah/tempat tinggal, baik itu statusnya sewa maupun kontrak, namun jika dihitung dari backlog kepemilikan maka angkanya masih cukup tinggi dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki/membeli rumah sendiri, sehingga mereka harus tinggal di rumah sewa maupun rumah kontrak.

Berikut Data berdasarkan backlog kepemilikan dan backlog hunian yaitu Total backlog kepemilikan sebesar 86.848 unit dengan rata rata per kelurahan 2.554 unit dan Backlog Hunian sebesar 24.931 unit dengan rata-rata per kelurahan 733 unit. Persebaran backlog perumahan terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu mencapai 5.729 unit atau sebesar 24%.

Di sisi lain, terkait solusi alternatif guna memenuhi tuntutan penyediaan rumah yang layak huni untuk kepentingan pengurangan *backlog*, yaitu berupa penyediaan rumah susun di Kota Balikpapan yang telah terbangun sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Keberhasilan pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dan program pengelolaan rumah susun sebagai berikut :

Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan dengan anggaran Rp.50.000.000,00 meliputi kegiatan pokok penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan

2. Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas

Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas dengan

anggaran Rp.50.000.000,00 meliputi kegiatan koordinasi dengan pihak pengembang dan persiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyerahan PSU.

3. Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp.200.000.000,00 meliputi biaya operasional pengawasan di lapangan dan belanja modal pengadaan papan informasi PSU disertai Pemasangan Papan Informasi Fasum.

Program Pengelolaan Rumah Susun

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rusunawa dengan anggaran Rp.2.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok berupa Pengadaan Bangunan Flat/Rumah susun, Pengadaan Bangunan Siring dan Pengadaan Bangunan Tempat Parkir.

2. Operasional Infrastruktur Rumah Susun

Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun dengan anggaran Rp.2.000.000.000,00 meliputi honorarium petugas pengamanan dan operasional di Sembilan Rusunawa termasuk biaya operasional dan perbaikan rusunawa.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Tersedianya Rumah Susun Sederhana dari Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat Sembilan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata –rata 96 kamar per rusunawa
2. Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembangunan perumahan oleh pengembang swasta melalui skema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan skema nonsubsidi atau non-MBR sebanyak 50%.

3. Program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.
4. Program rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi.

Permasalahan yang dihadapi :

Antisipasi dalam mengatasi backlog kepemilikan rumah, karena diasumsikan bahwa jumlah *backlog* tiap tahun akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum memiliki rumah, sementara faktor alam berupa lahan yang akan digunakan untuk perumahan semakin terbatas kedepannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada gilirannya akan menimbulkan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman yang sangat besar, sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas, menurut catatan hanya 15% kebutuhan perumahan yang mampu disediakan oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 85% disediakan langsung oleh masyarakat atau swasta.

Apabila pembangunan perumahan yang dilakukan masyarakat atau swasta ini tidak dikendalikan pengembangannya akan menimbulkan masalah besar yang mengancam kawasan konservasi atau kawasan lindung. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memberdayakan atau menguatkan peran masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan perumahannya sendiri yang sehat, aman serasi dan produktif tanpa merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat luas.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni				
1	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	0,85%	0,36%	158,83%

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 158,83% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan Rumah} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100\% \\ \text{tidak layak huni} &= \frac{721}{202.539} \times 100\% \\ &= 0,36\% \\ \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,85 - (0,36 - 0,85)}{0,85} \times 100\% \\ &= 158,83\% \end{aligned}$$

Indikator sasaran strategis 3 adalah penurunan persentase rumah tidak layak huni dari target 1.030 unit pada tahun 2018 menjadi 1.015 unit pada tahun 2019, sementara berdasarkan data terbaru dari pekerjaan pendataan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2019 diperoleh hasil bahwa terdapat 721 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Ini artinya dari target 1.015 RTLH di tahun 2019 justru fakta di lapangan cukup menggembirakan karena RTLH yang ada justru di bawah angka 1.015 unit yaitu tersisa 721 unit.

Keberhasilan target kinerja tersebut merupakan hasil dari pada intervensi kegiatan fisik yang bersumber Dana Pusat (APBN). Sedangkan intervensi fisik yang berasal dari non APBN khususnya untuk sumber APBD Kota Balikpapan pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena terbentur Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RTLH bukan kewenangan Kabupaten/Kota. Situasi ini kiranya menjadi tantangan sekaligus peluang yang cukup masif untuk lebih diberikan prioritas bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Pencapaian target kinerja tersebut diakomodir melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp.220.000.000,00 meliputi Pendataan rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan dan penyusunan

Peraturan Wali Kota Balikpapan Perihal Bantuan Perumahan Swadaya. Dari baseline tahun 2019 didata sebanyak 1.075 unit rumah dan berhasil meningkatkan kualitas RTLH menjadi Rumah Layak Huni melalui dana yang bersumber sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan

No	Sumber Dana	Jumlah Rumah
1	DAK	77
2	APBN	235
3	APBD Provinsi	55

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Hasil verifikasi calon penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan.
2. Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi :

Catatan khusus berkaitan dengan penanganan RTLH ini, yang sebagian besar arah kebijakannya diwujudkan melalui kegiatan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas RTLH / perbaikan rumah, adalah masih dijumpainya pola pikir/ anggapan/ pendapat masyarakat bahwa jika berniat memberi bantuan semestinya Pemerintah/ Pemerintah Daerah sekaligus sampai dengan terbangunnya rumah secara tuntas tanpa persyaratan adanya swadaya dari si penerima bantuan.

Hal ini mengingat bahwa sebagian besar yang menerima bantuan adalah memang dari kelompok miskin dan bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diharapkan Pemerintah ketika meluncurkan program bantuan RTLH ini.

Mengingat hal tersebut diatas, dianggap perlu adanya dukungan juga

dari dana APBD Kota Balikpapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di kota Balikpapan.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Penyediaan Taman Kota				
1	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,017%	0,015,%	88,23%

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penyediaan taman kota sebesar 88,23% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penyediaan} &= \frac{\Sigma \text{Luas Taman Kota}}{\Sigma \text{Luas Kawasan Perkotaan (354,62km}^2\text{)}} \times 100\% \\
 \text{taman kota} &= \frac{(38.701 + 15.655,40)}{354.620.000} \times 100\% \\
 &= 0,015\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,015}{0,017} \times 100\% \\
 &= 88,23\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target kinerja penyediaan taman kota berhasil memenuhi target sebesar 88,23% walaupun tidak mencapai 100%, namun hasil ini sangat mengembirakan mengingat terbatasnya lahan yang tersedia untuk penyediaan pembuatan taman-taman baru. Adapun data pembuatan taman sepanjang tahun 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9. Data Pembuatan Taman Tahun 2019

NO	NAMA TAMAN	LUASAN	LOKASI
1	Taman Graha Indah Tahap II	181,00	Graha
2	Taman Pramuka	440,40	Atas air Margasari
3	Taman Madinatul Iman	863,00	Islamic Center
4	Taman Depan BPJS Ketenagakerjaan BP	180,00	BP
5	Taman Depan Perusahaan Samping DHL	120,00	Stalkuda
6	Taman Batu Ampar Terminal C	200,00	Terminal Batu Ampar
7	Jalan Kasih Depan Bethani	200,00	Depan Gereja Bethani
8	Depan Bandara	400,00	Depan Bandara
9	MT. Haryono Depan Global	321,00	Depan Global
10	Taman KM. 08	800,00	KM. 08
11	Taman KM. 07	700,00	KM. 07
12	Taman KM. 7,5	600,00	KM. 7,5
13	Taman KM. 08 Depan SMKN.6	150,00	KM. 08 Depan SMKN 6
14	Taman KM 10	200,00	KM. 10
15	Taman KM 25	400,00	KM. 25
16	Jl. Manuntung	600,00	
17	Stadion Batakan	2.000,00	Manggar
18	Manggar	1.000,00	
19	Balikpapan Barat	600,00	
20	Jl. Mulawarman	400,00	
21	Taman KM. 06	400,00	
	Peningkatan Taman		
23	Peningkatan RSS	1.800,00	
24	Peningkatan At-Taqwa	300,00	
25	Peningkatan Batu Ampar	200,00	
26	Jalan Masuk Pantai Manggar	400,00	

NO	NAMA TAMAN	LUASAN	LOKASI
	Iswahyudi	400,00	
	Jl. Syarifudin Yoes	400,00	
	Peningkatan Jalan Soeprpto	200,00	
	Jl. Jend. Sudirman	1.200,00	
Jumlah		15.655,40	

Berdasarkan tabel diatas luasan taman yang berhasil dibuat pada tahun 2019 seluas 15.655,40 atau kurang lebih 1,5 ha. Sementara target pada Renstra setiap tahunnya adalah 2 (dua) hektar, walaupun tidak mencapai target maksimal di Renstra, mengingat terbatasnya lahan dan anggaran untuk pembuatan taman baru, tentunya pencapaian kinerja ini patut diapresiasi terutama untuk semua personil di bidang taman yang telah berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang terbatas dan sangat jeli memanfaatkan lahan lahan kosong yang walaupun dari segi luasan cukup kecil namun setidaknya dapat memanfaatkan sudut-sudut kota yang kosong menjadi indah dan menarik.

Berikut jumlah keseluruhan RTH di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2019

Tabel 10. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas (m ²)
1.	Balikpapan Tengah	6.201
2.	Balikpapan Utara	56.595,95
3.	Balikpapan Selatan	50.248
4.	Balikpapan Timur	30.400
5.	Balikpapan Barat	416,21
J U M L A H		143.861,16

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota dengan anggaran Rp.13.338.515.000,00 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Pembuatan Taman Kelurahan Graha Indah Tahap II
 - b. Peningkatan Taman Kawasan Damai III
 - c. Pembangunan Taman Pramuka Tahap II
 - d. Penataan Taman Samping Masjid At Takwa
 - e. Peningkatan Taman Tiga Generasi
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias /Peneduh dengan anggaran Rp.4.346.500.000,00 meliputi kegiatan prioritas berupa pengadaan jalan pembibitan km.12 dan pengadaan drainase/saluran air pembibitan kota hijau, serta pengadaan pagar di pembibitan km.12 serta pengadaan tanaman peneduh.

Permasalahan yang dihadapi :

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian kinerja penyediaan taman kota masih seperti tahun tahun sebelumnya yaitu Ketersediaan lahan milik Pemerintah Kota untuk dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat terbatas, begitu pula dengan keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan dalam rangka pembuatan taman-taman baru.

Belum tersedianya lokasi lahan yang sesuai peruntukannya dan jaminan kepastian ketersediaan alokasi anggaran/ pembiayaannya, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk kemudian mencoba menempatkan arah kebijakannya pada pengadaan lahan dan menempatkannya sebagai salah satu rancangan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan serta bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun taman secara swadaya di sekitar lingkungan mereka berada.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 5 : Meningkatkan Pelayanan Permakaman				
1	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan permakaman	95%	100%	105%

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 106 % dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ahli waris yang} &= \frac{\Sigma \text{Ahli Waris yang merasa puas}}{\Sigma \text{Ahli Waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\% \\
 \text{puas terhadap pelayanan} & \\
 \text{permakaman} & \\
 &= \frac{1.792}{1.792} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{100}{95} \times 100\% \\
 &= 105\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman dengan anggaran Rp. 4.387.180.000,00 yang meliputi kegiatan pokok berupa Pengadaan Bangunan Sarana Prasarana Permakaman yang tersebar di beberapa TPU di Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Pembuatan siring TPU Batakan
2. Pembuatan pagar TPU Batakan
3. Pembuatan Pos Tunggu TPU Gunung Guntur
4. Pembuatan Pos Tunggu Km.11
5. Pembuatan pondasi TPU Patok Merah

6. Review siteplan dan pembuatan DED blok I TPU

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
2. Terlaksananya SOP Permakaman sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semua proses pelayanan permakaman kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3. Koordinasi dan konsultasi, kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (Dinas/Instansi terkait).
4. Struktur organisasi dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
Pembentukan struktur organisasi dan personil pelaksana kegiatan dimaksud untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada personil pelaksana kegiatan. Struktur organisasi kegiatan yang dimaksud diatas terdiri dari :
 - Pengguna Anggaran
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - Staff Pelaksana

Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.

Permasalahan yang dihadapi :

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya lahan permakaman yang dapat disediakan pemerintah Kota.

2. Untuk mengantisipasi ketersediaan lahan pemakaman maka Pemerintah Kota telah membangun TPU Km.15, namun dikarenakan jaraknya yang cukup jauh sehingga banyak keluarga yang hendak memakamkan anggota keluarganya lebih memilih untuk memakamkan di TPU yang terdekat di tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih lokasi pemakaman.
3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pemakaman seperti pemakaian mobil jenazah dan kegiatan gali kubur ataupun proses memindahkan kerangka.

2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi		Capaian	
			2018	2019	2018	2019
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,32 %	2,37 %	2,32 %	100%	100%
2	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	79	70 %	42,88 %	113,58%	146 %
3	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,85	0,77 %	0,36 %	110,46%	158,83 %
4	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,017	0,013 %	0,015 %	9,17 %	88,23 %
5	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	95	100 %	95%	100%	105

3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 dengan target akhir Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis

Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	capaian	Target	Capaian
Mengurangi Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,32 %	2,32 %	100%	2,23	96 %
Mengurangi Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	79	42,88 %	146 %	75%	143 %
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,85	0,36 %	158,83%	0,83%	157%
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,017	0,015 %	88,23%	0,025%	60%
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	95	100%	105	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2019 disajikan sebagai berikut;

1. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran pertama yaitu Mengurangi Luas Kawasan Kumuh saat ini dengan menggunakan indikator persentase berkurangnya luas kawasan kumuh. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 2,37 % menjadi 2,32 % kawasan kumuh. Meskipun demikian capaian masing-masing tahun tetap sama yaitu 100%.

Keberhasilan peningkatan kinerja sasaran ini di sebabkan oleh baiknya kolaborasi dari Pemerintah Kota Balikpapan dengan KOTAKU yang anggarannya berasal dari berbagai sumber (APBN dan APBD Prov). Kebijakan Penanganan kawasan kumuh seluas 5 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, selanjutnya diatas 10 dan 15 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dana APBN yang dikucurkan melalui program KOTAKU disinyalir telah mampu mengurangi kawasan kumuh di Kota Balikpapan secara signifikan dan melampaui dari 5 ha. Hal tersebut berarti telah melebihi dari target kinerja dengan sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh. Bahkan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan adalah seluas 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019.

2. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kedua yaitu mengurangi *backlog* perumahan saat ini dengan menggunakan indikator persentase penurunan *backlog* perumahan Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 70 % menjadi 42,88 % .

Keberhasilan peningkatan kinerja ini didukung oleh optimalisasi Rumah

Susun Sederhana dari Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu Sembilan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata – rata 96 kamar per rusunawa, Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembangunan perumahan oleh pengembang swasta melalui skema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan skema nonsubsidi atau non-MBR sebanyak 50%. Program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka dan juga program rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi.

3. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ketiga yaitu mengurangi persentase rumah tidak layak huni saat ini dengan menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 0,77 % menjadi 0,36 % .

Keberhasilan peningkatan target kinerja tersebut merupakan hasil dari pada intervensi kegiatan fisik yang bersumber Dana Pusat (APBN). Sedangkan intervensi fisik yang berasal dari non APBN khususnya untuk sumber APBD Kota Balikpapan pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena terbentur Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RTLH bukan kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran keempat yaitu meningkatnya penyediaan taman kota saat ini dengan menggunakan indikator persentase penyediaan taman kota. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari 0,013 % menjadi 0,015 % .

Keberhasilan peningkatan target kinerja tersebut merupakan hasil pemanfaatan lahan lahan kosong yang walaupun dari segi luasan cukup kecil namun setidaknya dapat memanfaatkan sudut-sudut kota yang kosong. Adapun penambahan penyediaan aman tersebut antara lain dari

pembuatan Taman Kelurahan Graha Indah Tahap II, peningkatan Taman Kawasan Damai III, pembangunan Taman Pramuka Tahap II, penataan Taman Samping Masjid At Taqwa.

5. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kelima yaitu meningkatnya pelayanan permakaman saat ini dengan menggunakan indikator persentase ahli waris yang puas terhadap layanan permakaman. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya terdapat kesamaan angka realisasi yaitu 100 % .

Keberhasilan mempertahankan kinerja yang baik untuk sasaran strategis ini disebabkan oleh Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dan Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2019. Berdasarkan pagu definitif TA 2019, anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp. 48.484.744.550,00 dengan realisasi mencapai Rp.43.654.251.848,00 atau 90,04 %.

**Tabel 13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja
Pada dinas perumahan dan permukiman kota balikpapan
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,32	2,32	100	100	Program Lingkungan Sehat	5.632.576.250,00	3.616.656.955,59	64,21	73,51	26,49
							Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	300.000.000,00	295.446.325,00	98,48		
							Penanganan Kawasan kawasan permukiman kumuh	2.861.505.000,00	1.612.757.800,03	56,36		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat	200.000.000,00	188.839.426,00	94,42		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	2.015.000.000,00	1.265.637.404,56	62,81		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2019)	189.741.250,00	189.741.000,00	100,00		
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA.2019)	66.330.000,00	64.235.000,00	96,84		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.228.091.300,00	992.115.499,00	80,79		
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	1.826.000,00	33,20		
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya , Air dan Listrik	210.000.000,00	93.266.849,00	44,41		
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.125.000,00	8.153.400,00	14,79		
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.750.000,00	34.689.600,00	94,39		
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.250.000,00	108.900.550,00	98,78		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.250.000,00	86.431.575,00	78,40		
							Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan	22.050.000,00	20.759.200,00	94,15		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.520.000,00	12.315.000,00	70,29		
							Penyediaan Makanan dan Minuman	110.185.000,00	90.225.000,00	81,89		
							Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	356.825.000,00	355.322.558,00	99,58		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	193.636.300,00	180.225.767,00	93,07		
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.494.800.000,00	2.889.835.756,89	82,69		
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	84.277.050,00	84,28		
							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	230.000.000,00	214.328.261,89	93,19		
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000.000,00	2.452.257.545,00	81,74		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.800.000,00	46.293.500,00	74,91		
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103.000.000,00	92.679.400,00	89,98		
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000,00	9.400.000,00	62,67		
							Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	15.000.000,00	9.400.000,00	62,67		
							Program Penyebarluasan Informasi Daerah	52.500.000,00	40.535.000,00	77,21		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	79	42,88	146,00	146,00	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	52.500.000,00	40.535.000,00	77,21	90,73	55,27
							Program pengembangan Perumahan	300.000.000,00	282.202.330,00	94,07		
							Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan	50.000.000,00	47.690.200,00	95,38		
							Pengawasan dan Penertiban Pengembangan Perumahan	200.000.000,00	189.904.630,00	94,95		
							Verifikasi Penyerahan Sarana dan Prasarana Umum (PSU)	50.000.000,00	44.607.500,00	89,22		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,85	0,36	158,83	158,83	Program Pengelolaan Rumah Susun	4.500.000.000,00	3.932.355.306,00	87,39	90,15	68,68
							Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	2.500.000.000,00	2.373.927.330,00	94,96		
							Operasional Infrastruktur Rumah Susun	2.000.000.000,00	1.558.427.976,00	77,92		
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,017	0,015	88,23	88,23	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	211.060.000,00	190.273.890,00	90,15	93,97	-5,74
							Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	211.060.000,00	190.273.890,00	90,15		
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21.374.436.300,00	20.085.531.698,88	93,97		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	95	100	105,00	105,00	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	14.612.080.700,00	13.576.037.042,96	92,91	96,19	8,81
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	6.762.355.600,00	6.509.494.655,92	96,26		
							Program Pengelolaan Areal Permakaman	4.881.850.700,00	4.696.060.411,64	96,19		
							Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana	4.881.850.700,00	4.696.060.411,64	96,19		
Rata-rata Capaian Kinerja					119,61	119,61				88,11%	88,91	30,70

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 (6-13)	
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA								41.690.314.550,0	36.734.966.848,0				
								0	0				
Rata-rata Capaian Anggaran sesuai SIMONTEPRA													
Rata-rata Tingkat Efisiensi (Capaian Kinerja dikurangi Capaian Anggaran)													

Dibandingkan dengan kinerja pada capaian tahun 2019, maka realisasi anggaran sebesar 88,11% dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 119,61 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 30,70 %

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2019 (setelah perubahan), maka realisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	2.454.100.000,00	2.645.720.935,00	107,81%
Belanja	48.484.744.550,00	43.025.820.731,00	88,74%

Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 guna mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Perubahan yang terdiri atas Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 2.454.100.000,00 (Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dan Sewa Rumah Dinas) dan terealisasi sebesar Rp. 2.645.720.935,00
2. Pagu APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp.36.950.060.250,00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua

- ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp.6.564.156.000,00
 - b. Belanja Langsung Rp.36.950.060.250,00
3. Pagu APBD Perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp.48.484.744.550,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp.6.794.430.000,00
 - b. Belanja Langsung Rp.41.690.314.550,00
4. Realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.43.654.251.848,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp.6.919.285.000,00
 - b. Realisasi Belanja Langsung Rp.36.734.966.848,00

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,32	2,32	100	Program Lingkungan Sehat	5.632.576.250,00	3.616.656.955,59	64,21
						Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	300.000.000,00	295.446.325,00	98,48
						Penanganan Kawasan kawasan permukiman kumuh	2.861.505.000,00	1.612.757.800,03	56,36
						Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat	200.000.000,00	188.839.426,00	94,42
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	2.015.000.000,00	1.265.637.404,56	62,81
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2019)	189.741.250,00	189.741.000,00	100,00

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA.2019)	66.330.000,00	64.235.000,00	96,84
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.228.091.300,00	992.115.499,00	80,79
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	1.826.000,00	33,20
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya , Air dan Listrik	210.000.000,00	93.266.849,00	44,41
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.125.000,00	8.153.400,00	14,79
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.750.000,00	34.689.600,00	94,39
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.250.000,00	108.900.550,00	98,78
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.250.000,00	86.431.575,00	78,40
						Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan	22.050.000,00	20.759.200,00	94,15

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.520.000,00	12.315.000,00	70,29
						Penyediaan Makanan dan Minuman	110.185.000,00	90.225.000,00	81,89
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	356.825.000,00	355.322.558,00	99,58
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	193.636.300,00	180.225.767,00	93,07
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.494.800.000,00	2.889.835.756,89	82,69
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	84.277.050,00	84,28
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	230.000.000,00	214.328.261,89	93,19
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000.000,00	2.452.257.545,00	81,74
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.800.000,00	46.293.500,00	74,91

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	79	42,88	146,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103.000.000,00	92.679.400,00	89,98
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000,00	9.400.000,00	62,67
						Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	15.000.000,00	9.400.000,00	62,67
						Program Penyebarluasan Informasi Daerah	52.500.000,00	40.535.000,00	77,21
						Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	52.500.000,00	40.535.000,00	77,21
						Program pengembangan Perumahan	300.000.000,00	282.202.330,00	94,07
						Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan	50.000.000,00	47.690.200,00	95,38
						Pengawasan dan Penertiban Pengembangan Perumahan	200.000.000,00	189.904.630,00	94,95
					Verifikasi Penyerahan Sarana dan Prasarana Umum (PSU)	50.000.000,00	44.607.500,00	89,22	

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,85	0,36	158,83	Program Pengelolaan Rumah Susun	4.500.000.000,00	3.932.355.306,00	87,39
						Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	2.500.000.000,00	2.373.927.330,00	94,96
						Operasional Infrastruktur Rumah Susun	2.000.000.000,00	1.558.427.976,00	77,92
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,017	0,015	88,23	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	211.060.000,00	190.273.890,00	90,15
						Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	211.060.000,00	190.273.890,00	90,15
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21.374.436.300,00	20.085.531.698,88	93,97
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	95	100	105,00	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	14.612.080.700,00	13.576.037.042,96	92,91
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	6.762.355.600,00	6.509.494.655,92	96,26
						Program Pengelolaan Areal Permakaman	4.881.850.700,00	4.696.060.411,64	96,19
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana	4.881.850.700,00	4.696.060.411,64	96,19

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Anggaran
1	2		4	5	7	8	10	11	12
Rata-rata Capaian Kinerja					119,61				
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA							41.690.314.550,00	36.734.966.848,00	88,11%
Rata-rata Capaian Anggaran sesuai SIMONTEPRA									

C. Capaian Prestasi dan penghargaan

Selama tahun 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan belum mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih.

Bab IV Penutup

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan pelaksanaan organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal dengan harapan ada perbaikan dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap Perjanjian Kinerja 2019 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

LKjIP juga pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Disperkim, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala serta terdapat sasaran yang belum tercapai secara maksimal yang tentunya akan segera yang diupayakan perbaikannya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Renstra Tahun 2016-2021 sudah tercapai yakni dari 5 sasaran strategis, keseluruhan lima sasaran strategis telah mencapai target kinerja. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

TERIMA KASIH